

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rasyid Saliman, 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Edisi Keempat.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananda. 2017. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Bagus Irawan. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi*. Bandung. PT. Alumni.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Erwin Kallo, 2009, *Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen, dan Rusunami)*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo.
- Fauziah dan Rina Antasari. 2018. *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Hans Kelsen dan Somardi. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta. BEE Media Indonesia.
- Henry Campbell Black. 1991. *Black's Law Dictionary*. USA. West Publishing Co. St. Paul. Minn.
- Imran Nating. 2009. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*. Jakarta. Ed. Revisi-2. Raja Grafindo.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta. Mira Buana.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

- Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Rahayu Hartini. 2008. *Hukum Kepailitan*. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang Press.
- Raisul Mutaqien. 2006. *Teori Hukum Murni*. Bandung. Nuansa & Nuansa Media.
- Richard Eddy. 2010. *Aspek Legal Properti*. Yogyakarta. CV. Andi Offset.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok. PT Raja Grafindo.
- Serlika Aprita. 2016. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Makassar. Pena Indis.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori, Hukum Kepailitan*. Jakarta. Prenadamedia Group. Cetakan ke-2
- Urip Santoso. 2016 *Hukum Perumahan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Asikin. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Achmad Akbar Santosa Mulyadi. Sabir Alwy. Nurfaidah Said. 2022. *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Suatu Kredit Perbankan Akibat Penyebaran Covid-19 Dikategorikan Sebagai Keadaan Memaksa*. Doktrina: Journal of Law Volume 5 Nomor 1.
- Anton Ismoyo Aji. R. Suharto. dan Siti Malikhatun Badriyah. 2020. *Kewenangan Kreditor Separatis terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit*. Diponegoro Law Journal. Volume 6 Nomor 2.

- Anwar Borahima, Nur Aisyah. 2025. *Kepailitan Harta Peninggalan yang Telah Lewat Waktu*. Hasanuddin Civil and Business Law Review Volume 2 Nomor 2.
- Christiana Derita Risquany. 2022. *Akibat Hukum Kepailitan Bagi Pengembang Terhadap Pembeli (Konsumen) Satuan Rumah Susun (Apartemen)*. Jurnal Education and Development Volume 10 Nomor 3.
- Defa Caesaria Yolanda. 2017. *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst)*. Binamulia Hukum Volume 6 Nomor 2.
- Dhea Tri Febrina dan Ahars Sulaiman. 2019. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang PPAT*. Jurnal Petita Volume 1 Nomor 1.
- Erma Defiana Putriyanti dan Wijayanta T. 2010. *Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 3.
- Fence M. Wantu. 2007. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum Volume 19 Nomor 3.
- Hari Sutra Disemadi. Danial Gomes. 2021. *Perlindungan Hukum Kreditor Konkuren Dalam Perspektif Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume 9 Nomor 1.
- Indri Adelia Putri. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis dalam Kepailitan*. Jurnal Jaksa Volume 2 Nomor 2.
- Khardin. Anwar Borahima. Winner Sitorus. 2023. *Perlindungan Kreditor Atas Kewenangan Mutlak Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Perbankan*. Unes Law Review Volume 5 Nomor 4.
- M. Afif Gusti Fatah. 2014. *Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Jurnal Transparansi Hukum Volume 7 Nomor 1.
- Maulana Rihdo Al Fasil, et al. 2023. *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum,*

- Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum. Jurnal Usrah Volume 4 Nomor 2.
- Munif Rochmawanto. 2015. *Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan*. Jurnal Independent Volume 3 Nomor 2.
- Muhammad Kamran. Ahmadi Miru. Maskun. 2021. *Online Selling And Buying Fraud: The Law Of Electronic Transaction Perspective*, Jurnal Cendekia Hukum Volume 6 Nomor 2.
- Muh. Caesar Fachreza Harla. Andi Tenri Famauri. Andi Syahwiah A. Sapiddin. 2023. *Penggunaan Asas Audi Etal Terampartem Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri*, Collegium Studiosum Journal Volume 6 Nomor 1.
- Octavianna Evangelista. Hanafi Tanawijaya. 2018. *Analisis Mengenai Pertanggungjawaban Pengembang Rumah Susun Terkait Ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Studi Kasus Apartemen Parama Cilandak Jakarta Selatan)*. Jurnal Hukum Adigama.
- R. Tony Prayoga. 2011. *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*. Jurnal Legalisasi Indonesia Volume 13 Nomor 2.
- Rai Mantili. Putu Eka Trisna Dewi. 2021. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*. Jurnal Aktual Justice Volume 6 Nomor 1.
- Raimond Flora Lamandasa. 2011. *Penegakan Hukum*. dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, Tesis Berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta Notaris Yang Berkaitan dengan Pertanahan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raisa Inayati. 2019. *Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit*. E-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 5 Nomor 1.
- Rianda Riviyusnita. Husnaini. Andi Chandra, 2025. *Analisis Normatif Status Kepemilikan Apartemen/Rumah Susun Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia*. Jurnal Lex Librum Volume 12 Nomor 1.

Rommy Haryono Djojarahrdjo. 2019. *Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 1.

Roni Pandiangan. 2022. *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pembersihan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana*. Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif. 2021. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara. Volume 4 Nomor 2.

Syafrudin Makmur. 2016. *Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditur dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah. Volume 4 Nomor 2.

Usman R. 2016. *Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan*. Badamai Law Journal. Volume 1 Nomor 1.

Webstite

Fitri Novia Heriani. 2024. *Sebut Pengembang Tak Bisa Dipailit/PKPU, SEMA 3/2023 Dinilai Tak Sejalan UU Kepailitan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/sebut-pengembang-tak-bisa-dipailit-pkpu--sema-3-2023-dinilai-tak-sejalan-uu-kepailitan-lt65eee651b9ad2/> , diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 22:00 WITA

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

SEMA No. 3 Tahun 2023

Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman